

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN TA. 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2024

KATA PENGANTAR

Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Agar progres laporan dapat tersaji dengan jelas, maka LKPJ Bappelitbangda Tahun Anggaran 2023 berfokus pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan, maka obyek analisis pada Bab II merupakan capaian indikator kinerja urusan dan program serta realisasi keuangan.

Kami berharap, laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik di masa datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Benteng, Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19640310 198611 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB.I. Pendahuluan.....	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	11
BAB.II. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	13
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	13
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	13
2.1.2. Capain Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	52
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	53
2.1.4. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	54
2.1.5. Inovasi	76
2.1.6. Prestasi / Penghargaan.....	77
2.2. Kebijakan daerah	77
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPD Bupati Tahun Anggaran 2022	78
BAB.III. Capain Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan	79
2.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang dilaksanakan	79
2.2. Hambatan – Hambatan	79
BAB.IV. Penutup	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	11
Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2023	12
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2023	12
Tabel 2.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	14
Tabel 2.2. Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023	52
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023	53
Tabel 2.4. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2023.....	58
Tabel 2.5. Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023	68
Tabel 2.6. Analsis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan	75
Tabel 2.7. Kebijakan Daerah yang ditetapkan tahun 2023	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kepulauan Selayar	5
Gambar 2.1. Tampilan Website selayar.emonev	76



BAB I

Pendahuluan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban disusun sebagai amanat dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 719);
8. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 763) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor : 690).

1.2. Gambaran Umum OPD

Tipe Kantor dari Bappelitbangda adalah Tipe A, hal ini berdasarkan dari uraian tugas dan fungsi yang di bebaskan kepada Bappelitbangda yakni, Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Email : kepeg.bappedasly@gmail.com dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

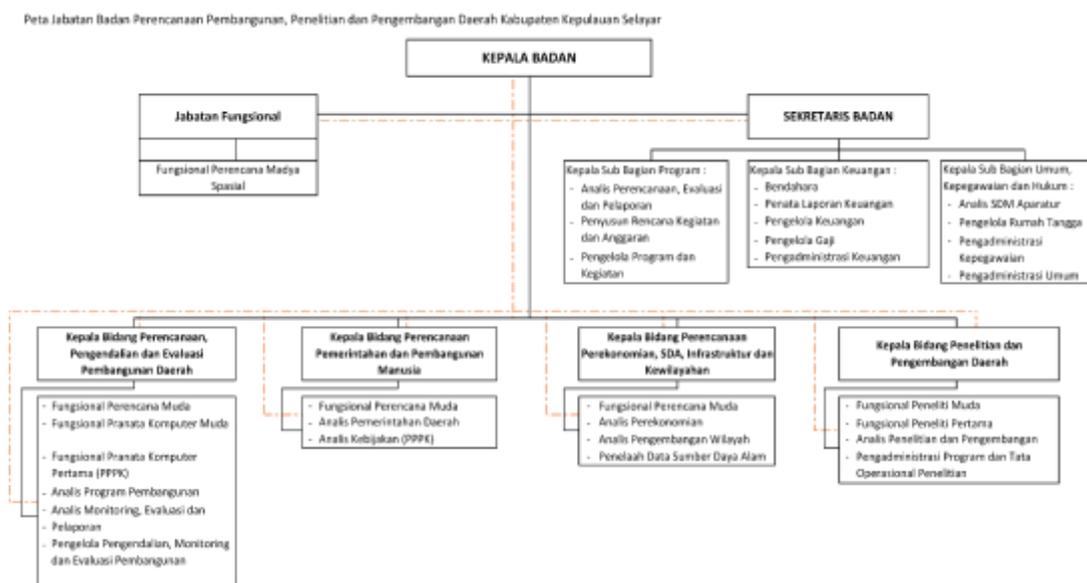
- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 4 Tahun 2022

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Badan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan

- kebersihan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan Fungsional lingkup Badan;
 - e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
 - i. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
 - j. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi lingkup Badan; dan
 - k. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan

urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan Fungsinya.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan

f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan Tugas dan fungsinya.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

(7) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar per Desember 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 pegawai. Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 pegawai, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 63 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel. I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	26	86,67%	41,27%	23	69,70%	36,51%
1	S3	1	3,33%	1,59%			
2	S2	10	33,33%	15,87%			
3	S1	14	46,67%	22,22%	23	69,70%	36,51%
4	D3	1	3,33%	1,59%			
	Bukan Perguruan Tinggi	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
1	SMA	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
Jumlah		30			33		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		63					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23%), golongan III sebanyak 20 pegawai (67%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel. I.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2023

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	7	23%
	IV/c	1	3%
	IV/a	6	20%
2.	Golongan III	20	67%
	III / d	10	33%
	III / c	1	3%
	III / b	6	20%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	3	10%
	II / d	1	3%
	II / c	1	3%
	II / b	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.33%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,67%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (36.67%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33.33%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. I.3. Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3.33%
2	Eselon III	5	16.67%
3	Eselon IV	3	10%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	36.67%
5	Jabatan Fungsional Umum	10	33.33%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2023 melaksanakan Empat Program dengan 8 (delapan) kegiatan penunjang, 6 (enam) kegiatan bidang urusan perencanaan serta 3 (tiga) kegiatan bidang urusan penelitian dan pengembangan.

Rata-rata capaian indikator kinerja program kegiatan mencapai 100% dengan realisasi keuangan 97,53% atau Rp.6.201.839.837 (Enam Miliar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan beberapa kegiatan merupakan amanah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, capaian kinerja sebagaimana tersebut, disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Penunjang Pemerintahan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
					3.349.423.600	3.309.886.494			
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		
						15.029.000	15.026.300		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen		
						3.283.300	3.283.300		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
						1.500.000	1.500.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
						1.500.000	1.500.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
						1.700.000	1.700.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2.000.000	2.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
					3.045.700	3.043.000			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
					2.000.000	2.000.000			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
					2.918.850.283	2.904.497.658			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					2.898.850.283	2.884.497.658			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	24 Laporan			
					12.000.000	12.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
					5.000.000	5.000.000			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Laporan	2 Laporan			
					3.000.000	3.000.000			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%			
					6.000.000	6.000.000			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
					3.000.000	3.000.000			
				Penatausahaan Barang Milik Derah Pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
					3.000.000	3.000.000			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%			
					30.000.000	23.050.000			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 ASN	5 ASN	Anggaran di pangkas, target tidak tercapai		
					30.000.000	23.050.000			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					515.386.000	504.652.653			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	12 Laporan			
					24.846.000	21.362.000			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Paket	12 Paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perundang-Undangan	5.920.000	5.920.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali 430.620.000	133 Kali 430.570.653			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan 54.000.000	1 laporan 46.800.000			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 125.899.000	1000% 115.547.000			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit 76.000.000	2 Unit 66.500.000			
				Pengadaan Mebel	4 Unit 6.500.000	4 Unit 5.898.000			
				Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	2 Unit 7.523.000	2 Unit 7.523.000			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit 1 Paket 35.876.000	2 Unit 1 Paket 35.626.000			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 236.766.800	100% 234.063.004			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan 30.230.000	1 Laporan 28.809.244			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen 206.536.800	100 Persen 205.253.800			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.183.000	231.233.200			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	17 Unit			
					152.780.000	140.277.500			
				Pemeliharaan Mebel	3 Unit	3 Unit			
					2.800.000	2.789.800			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit			
					10.750.000	10.685.800			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500M2	500M2			
					65.043.000	64.743.100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit	14 Unit			
					12.810.000	12.737.000			
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	80%	100%			
					1.044.083.000	985.679.555			
	Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RPJMD 2021-2026	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	85%	100%			
					736.588.000	704.186.355			
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
					20.891.000	19.337.000			
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen			
					108.259.000	107.852.907			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara			
					42.604.000	35.832.800			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara 36.955.000	1 Berita Acara 36.893.300			
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	440 Usulan 54.090.000	440 Usulan 52.918.500			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen 473.789.000	2 Dokumen 451.351.848			
			Inspektorat Propinsi	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 51.287.000	100% 39.794.000			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	68 Dokumen 11.450.000	68 Dokumen 8.889.000			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	26 OPD 18.791.000	26 OPD 17.359.000			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku 21.046.000	1 Buku 13.546.000			
			RPJMD 2021-2026	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100% 256.208.000	100% 241.699.200			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan 21.530.000	2 Laporan 21.181.200			
				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Laporan 0	1 Laporan 0	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan 234.678.000	4 Laporan 220.518.000			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	85% 665.226.000	100% 661.481.871			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			RPJMD 2021-2026	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	85% 263.244.000	100% 259.753.671			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen 14.358.000	11 Dokumen 14.198.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 OPD 4.675.000	11 OPD 4.675.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 laporan 17.782.000	11 laporan 17.252.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan 74.612.000	1 Laporan 74.245900			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen 29.216.000	5 Dokumen 28.361.800			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 OPD 10.000.000	5 Dokumen 10.000.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan 56.890.000	1 Laporan 56.037.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan 55.711.000	1 Laporan 54.983.971			
			RPJMD 2021-2026	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85% 163.065.000	100% 163.065.000			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	3 Dokumen 21.876.000	3 Dokumen 21.876.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 OPD 4.410.000	3 OPD 4.410.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan 20.860.000	1 Laporan 20.860.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Perekonomian	1 Laporan 24.728.000	1 Laporan 24.728.000			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen 29.887.000	3 Dokumen 29.887.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 OPD 7.950.000	3 OPD 7.950.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan 16.795.000	1 Laporan 16.795.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan 36.559.000	1 Laporan 36.559.000			
			RPJMD 2021-2026	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85% 238.917.000	100% 238.349.680			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	3 Dokumen 35.418.000	3 Dokumen 35.349.680			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 OPD 5.590.000	3 OPD 5.590.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan 62.364.000	1 Laporan 62.364.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan 53.280.000	1 Laporan 53.204.520			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	11 Dokumen 35.189.000	11 Dokumen 35.189.000			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 OPD 6.180.000	11 OPD 6.070.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan 14.618.000	1 Laporan 14.618.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan 26.278.000	1 Laporan 26.278.000			
	Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangam			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100% 521.195.000	100%			
				Kegiatan Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan	100% 321.172.000	100% 320.922.050			
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Dokumen 85.212.000	1 Dokumen 85.086.450			
				RPJMD 2021-2026	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen 235.960.000	1 Dokumen 235.835.600		
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100% 149.899.000	100% 149.799.000			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen 149.899.000	1 Dokumen 149.799.000			
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100% -	100% -			Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan usaha Milik Daerah	1 Dokumen -	1 Dokumen -	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	50% 50.124.000	50% 49.887.506			
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen -	1 Dokumen -	Anggaran di pangkas, Target tidak tercapai		
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen 50.124.000	1 Dokumen 49.887.506			

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, indikator capaian kinerja kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda yang tersusun dengan jumlah anggaran Rp.3.283.300, terealisasi sebesar Rp.3.283.300 dan hasilnya adalah 3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, diantaranya Dokumen Renja Bappelitbangda Tahun 2024, Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2023, dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda 2021-2026;

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.500.000 dan hasilnya Dokumen RKA Bappelitbangda Tahun 2024;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.1.500.000, terealisasi sebesar Rp.1.500.000 dan hasilnya adalah Dokumen Perubahan RKA Bappelitbangda tahun 2023;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan dengan jumlah anggaran Rp.1.700.000, terealisasi sebesar Rp.1.700.000 dan hasilnya adalah Dokumen DPA Bappelitbangda Tahun 2023;

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp.2.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.000.000 dan hasilnya adalah Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda Tahun 2023;

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.045.700, terealisasi sebesar Rp.3.045.700 dan hasilnya adalah 3 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, diantaranya Laporan Akuntabilitas Pemerintahan (Lakip) Bappelitbangda Tahun 2022, Laporan LKPJ Bappelitbangda Tahun 2022, dan Laporan LPPD Bappelitbangda Tahun 2022;

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.2.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.000.000 dan hasilnya adalah Laporan Evaluasi kinerja Per Triwulan Bappelitbangda Tahun 2023.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan dengan jumlah anggaran Rp.2.898.850.283, terealisasi sebesar Rp.2.884.497.658 dan keluarannya 31 Orang ASN terbayarkan gaji dan tunjangannya hingga 14 kali;

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran Rp.12.000.000, terealisasi sebesar Rp.12.000.000 dan keluarannya 24 Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Bappelitbangda;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran Rp.5.000.000, terealisasi sebesar Rp.5.000.000 dan keluarannya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;

- d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.000.000 dan keluarannya Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan keuangan Bappelitbangda oleh ITDA dan BPKP.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang

Milik Daerah yang Tepat Waktu dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.000.000 dan keluarannya Laporan Asset Bappelitbangda Per Triwulan Tahun 2023;

- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.3.000.000, terealisasi sebesar Rp.3.000.000 dan keluarannya Laporan rekonsiliasi asset Bappelitbangda Per Semester Tahun 2023.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Aparatur yang ditingkatkan Kualitas dan Kapabilitas Aparatur dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :.

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Fasilitasi Pelaksanaan Diklat Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan jumlah anggaran Rp.30.000.000, terealisasi sebesar Rp.23.050.000 dan keluarannya sebanyak 5 ASN mengikuti Pelatihan Tekhnis;

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.24.846.000, terealisasi sebesar Rp.21.362.000 dan keluarannya 12 Paket;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator capaian kinerja adalah Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.5.920.000, terealisasi sebesar Rp.5.920.000 dan keluarannya 4 koran/bahan bacaan;

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran Rp.430.620.000, terealisasi sebesar Rp.430.570.653 dan keluarannya 133 Laporan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah.

d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan jumlah anggaran Rp.54.000.000, terealisasi sebesar Rp.46.800.000 dan keluarannya Laporan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan jumlah anggaran Rp.76.000.000, terealisasi sebesar

Rp.66.500.000 dan keluarannya tersedianya 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua berbahan bakar Listrik;

b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Mebel Kantor dengan jumlah anggaran Rp.6.500.000, terealisasi sebesar Rp.5.898.000 dan keluarannya tersedianya 2 Unit Kursi Kerja dan 2 Unit Meja Kerja.

c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran Rp.7.523.000, terealisasi sebesar Rp.7.523.000 dan keluarannya tersedianya Peralatan Personal Computer berupa Printer sebanyak 2 Unit.

d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran Rp.35.876.000, terealisasi sebesar Rp.35.626.000 dan keluarannya tersedianya Pendingin Udara sebanyak 2 Unit, Dispenser Sebanyak 1 Unit dan Sumur Bor 1 Unit.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator capaian kinerja Kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Target kinerja Renstra

Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.30.230.000, terealisasi sebesar Rp.28.809.244 dan keluarannya tersedianya jaringan internet dan sumber daya air PAM;

b. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan jumlah anggaran Rp.206.536.800, terealisasi sebesar Rp.205.253.800 dan keluarannya tersedianya honorarium PTT, Honorarium Supir dan Honorarium Petugas Kebersihan, Pembayaran BPJS Tenagakerja dan penyediaan ATK.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan jumlah anggaran Rp.152.780.000, terealisasi sebesar Rp.140.277.500 dan keluarannya 36 Unit yang terbayarkan Pajak dan 17 Unit yang terpelihara;

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Mebel yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.2.800.000, terealisasi sebesar Rp.2.789.800 dan keluarannya 3 Unit Mebel yang di perbaiki;

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan Target 100% dengan jumlah anggaran Rp.10.750.000, terealisasi sebesar Rp.10.685.800 dan keluarannya 10 Unit peralatan kantor yang dipelihara, seperti laptop, dan 6 Unit printer yang dipelihara;

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah luas gedung kantor yang dipelihara dengan jumlah anggaran Rp.65.043.000, terealisasi sebesar Rp.64.743.100 dan keluarannya pemeliharaan lahan parkir seluas 500 M²;

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi dengan jumlah anggaran Rp.12.810.000, terealisasi sebesar Rp.12.737.000 dan keluarannya 25 Unit sarana prasarana Gedung kantor yang dirawat, seperti pendingin ruangan, televisi, kulkas dan lainnya.

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, indikator capaian kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pendanaan Dengan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 85% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub. Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RPJPD/RKPD yang disusun dengan jumlah anggaran Rp.20.891.000, terealisasi sebesar Rp.19.337.000 dan keluarannya 2 Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) diantaranya : RPJPD Tahun 2025-2045, dan Dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD Tahun 2024;

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.108.259.000, terealisasi sebesar Rp.107.852.907 dan keluarannya 2 Dokumen telaahan Rancangan Awal (Teknokratik), diantaranya Dokumen telaahan Rancangan Awal (Teknokratik) RPJPD 2025-2045 dan Dokumen telaahan Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD 2024;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Berita Acara Hasil Konsultasi Publik dengan dengan jumlah anggaran Rp.42.604.000, terealisasi sebesar Rp.35.832.800 dan keluarannya 2 Berita acara hasil konsultasi publik diantaranya Berita acara hasil konsultasi publik dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RPJPD 2025-2045 dan Berita acara hasil konsultasi publik dokumen Rancangan Awal (Teknokratik) RKPD Tahun 2024;

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp.36.955.000, terealisasi sebesar Rp.36.893.300 dan keluarannya berita acara musrenbang RKPD Tahun 2024;

- e. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Usulan musrenbang kecamatan yang Terverifikasi dengan jumlah anggaran Rp.54.090.000, terealisasi sebesar Rp.52.918.500 dan keluarannya 440 Usulan hasil musrenbang kecamatan yang terverifikasi;

- f. Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan jumlah anggaran Rp.473.789.000, terealisasi sebesar Rp.451.351.848 dan keluarannya 2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan diantaranya Dokumen RKPD Tahun 2024 dan, Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2023.

- 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang Telah dianalisis untuk Perencanaan Pembangunan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu:

- a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.11.450.000, terealisasi sebesar Rp.8.889.000 dan keluarannya 68 Masukan Analisis data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Target 1 Orang Per OPD dengan jumlah anggaran Rp. 18.791.000, terealisasi sebesar Rp.17.359.000 dan keluarannya 28 Orang (28 OPD);

- c. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan dengan jumlah anggaran Rp.21.046.000, terealisasi sebesar Rp.13.546.000 dan Keluaran Buku profil Pembangunan Daerah Tahun 2023, sub kegiatan tersebut juga merupakan hasil rekomendasi reuiu kinerja oleh Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dengan Target

kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dengan jumlah anggaran Rp.21.530.000, terealisasi sebesar Rp.21.181.200 dan keluarannya 2 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Monev RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023);

b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran Rp.234.678.000, terealisasi sebesar Rp.220.518.000 dan Keluarannya Laporan Triwulan hasil valuasi pelaksanaan APBD dan Tugas Pembantuan Tahun 2023.

➤ **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Pembangunan Manusia dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 85% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.14.358.000, terealisasi sebesar Rp.14.198.000 atau sebesar 98.89%, dengan keluaran 11 Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang difasilitasi penyusunannya;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.4.675.000, terealisasi sebesar Rp.4.675.000 atau sebesar 100%, dengan keluaran 11 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah dengan jumlah anggaran Rp.17.782.000, terealisasi sebesar Rp.17.252.000 atau sebesar 97.02% dengan keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Pemerintahan;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dengan jumlah anggaran Rp.74.612.000, terealisasi sebesar Rp.74.245.000 atau sebesar 99.51% dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan penurunan angka kemiskinan ekstrem serta data SDGs;

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang Terfasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.29.216.000, terealisasi sebesar Rp.28.361.000 atau sebesar 97.08% dengan keluaran 5 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia yang difasilitasi penyusunannya;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.10.000.000, terealisasi sebesar Rp.10.000.000 atau sebesar 100% dengan keluaran 5 Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.56.890.000, terealisasi

sebesar Rp.56.037.000 atau sebesar 98.50% dengan keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Sumber Daya Manusia;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dengan jumlah anggaran Rp.55.711.000, terealisasi sebesar Rp.54.983.971, dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting, anak putus sekolah, kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak (KLA), serta kabupaten sehat.

- 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 85% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.21.876.000, terealisasi sebesar Rp.21.876.000 dengan keluarannya 3 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian yang difasilitasi penyusunannya;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.4.410.000, terealisasi sebesar Rp.4.410.000 dengan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah bidang perekonomian yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah Bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.20.860.000, terealisasi sebesar Rp.20.860.000 dengan Keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Perekonomian.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD Pada bidang Perekonomian dengan jumlah anggaran Rp.24.728.000, terealisasi sebesar Rp.24.728.000 dengan keluarannya keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan penurunan angka kemiskinan, dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau propinsi Sulawesi Selatan.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJP, RPJMD dan RKPD).

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.29.887.000, terealisasi sebesar Rp.29.887.000 dengan Keluaran 3 Dokumen

Perencanaan OPD Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi penyusunannya;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.7.950.000, terealisasi sebesar Rp.7.950.000 dengan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah bidang perekonomian yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran Rp.16.795.000, terealisasi sebesar Rp.16.795.000 dengan Keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Sumber Daya Alam;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam dengan jumlah anggaran Rp.36.559.000, terealisasi sebesar Rp.36.559.000; dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), RPSDA-WS (rencana pembangunan strategis sumber daya air wilayah Jeneberang) dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Indikator capaian kegiatan adalah Persentase Kesesuaian Program Prioritas Perangkat Daerah Dengan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 85% dan realisasi sebesar 100%. Program tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Terasilitasi Penyusunan Dokumen

Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.35.418.000, terealisasi sebesar Rp.35.349.680 dengan Keluaran 3 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Infrastruktur yang difasilitasi penyusunannya;

- b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp.5.590.000, terealisasi sebesar Rp.5.590.000 dengan Keluaran 3 Organisasi Perangkat Daerah bidang perekonomian yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.62.364.000, terealisasi sebesar Rp.62.364.000 dengan Keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Insfrastruktur;

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Singkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dengan jumlah anggaran Rp.53.280.000, terealisasi sebesar Rp.53.204.520 dengan keluaran 3 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan tersebut memuat fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan RDTR (Kawasn KIPT Hangkoang dan KEK Pasi Gusung);

- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Terealisasi Penyusunan Dokumen Perencanaannya (JP/JM/T) dengan jumlah anggaran Rp.35.189.000, terealisasi sebesar Rp.35.189.400 dengan Keluaran 11 Dokumen Perencanaan OPD Bidang Kewilayahan yang difasilitasi penyusunannya;

- f. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistenesi Dalam

Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. dengan jumlah anggaran Rp.6.180.000, terealisasi sebesar Rp.6.070.000 dengan Keluaran 11 Organisasi Perangkat Daerah bidang kewilayahan yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

- g. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.14.618.000, terealisasi sebesar Rp.14.618.000 dengan Keluaran 1 Rekomendasi hasil pelaksanaan Renja OPD Bidang Kewilayahan;

- h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD pada Bidang Kewilayahan dengan jumlah anggaran Rp.26.278.000, terealisasi sebesar Rp.26.278.000 dengan keluaran 1 Laporan Pendampingan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat, laporan

tersebut memuat fasilitasi pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

➤ **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub. Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan jumlah anggaran Rp.85.212.000, terealisasi sebesar Rp.85.086.450 atau sebesar 99.85% dengan keluaran 1 Laporan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, laporan fasilitasi tersebut memuat diantaranya :

- a) Fasilitasi pengukuran Indeks daya saing daerah;
- b) Fasilitasi pengukuran Indeks pengelolaan keuangan daerah;
- c) Fasilitasi pengukuran Indeks tata kelola pemerintahan daerah;

- d) Evaluasi program bantuan nelayan;
 - e) Evaluasi capaian IKU dan IKK RPJMD;
 - f) Koordinasi pengelolaan cagar biosfer;
 - g) Koordinasi inisiasi pembentukan kebun raya di puncak tanadoang;
 - h) Fasilitasi pembentukan Bapperida;
 - i) Fasilitasi program usaid erat provinsi, dan
 - j) Evaluasi kegiatan kelitbangan dan inovasi.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan Umum dengan jumlah anggaran Rp.235.960.000, terealisasi sebesar Rp.235.835.600 atau sebesar 99.95% dengan keluaran 1 Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Dimanfaatkan dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial, Indikator capaian kinerja sub

kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dengan jumlah anggaran Rp.149.899.000, terealisasi sebesar Rp.149.799.000 atau sebesar 99.93% dengan keluaran 1 Dokumen Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

3. Kegiatan Pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Indikator Capaian Kegiatan adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Mengembangkan Inovasi dan Tekhnologi Daerah dengan Target kinerja Renstra Tahun 2023 sebesar 50% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan, Indikator capaian kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, dengan jumlah anggaran Rp.50.124.000, terealisasi sebesar Rp.49.887.506 atau sebesar 99.53% dengan keluarannya 1 Laporan Fasilitasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan, laporan fasilitasi tersebut memuat diantaranya :
 - a) Fasilitasi pelaksanaan IGA;
 - b) Fasilitasi inovasi (rumpul laut jadi pupuk);
 - c) Fasilitasi Puja Indah kemendagri;
 - d) Fasilitasi kajian alga bloom, dan;
 - e) Diseminasi survei IKS dan IKM.

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Sebagai implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepulauan Selayar Nomor : 18/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, disampaikan bahwa hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	85	100	118
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan prioritas sasaran pembangunan daerah	%	85	100	118
2.	Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	%	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar

Dari tabel diatas, Bappelitbangda memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 2 (dua) sasaran strategis Bappelitbangda

Kepulauan Selayar. dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 135.3%.

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan 2 Fungsi Utama yani : 1) Fungsi Penunjang Perencanaan dan 2) Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Urusan Perencanaan						
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	85	100	118
	Program, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan prioritas sasaran pembangunan daerah	%	85	100	118
Urusan Penelitian dan Pengembangan						
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	%	100	100	100
Urusan Penunjang						
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip	Nilai	B	B*	100*
		Persentase Nilai Temuan Keuangan	%	0	0**	100*

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar 2023

* data tahun 2022, ** data tahun 2021

Tabel 3.3 di atas menunjukkan realisasi capaian kinerja bidang urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, Adapun hasil realisasi kinerja pada urusan penunjang, sampai dengan saat ini, belum dapat disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2023, disebabkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun 2023 dan pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1) Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

Indikator kinerja program diukur berdasarkan Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD, Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan, juga merupakan representasi dari kualitasnya perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian keselarasan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh)

program perencanaan Pembangunan pada tahun 2023 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdapat 285 (dua ratus delapan puluh lima) program. Terdapat 2 program yang tidak dijalankan pada tahun 2023, pernyataan tersebut juga dapat dilihat pada Laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 oleh Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan dan pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 halaman 33;

2. Dari 274 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2023, terdapat 245 program dianggarkan pada APBD dan sebanyak 29 program atau sebanyak 10,58 persen yang tidak dianggarkan pada APBD;
3. Dari 733 kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2023, terdapat 589 kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 144 kegiatan atau sebanyak 19,65 persen tidak dianggarkan pada APBD;
4. Dari 2911 sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2023, terdapat 1604 sub kegiatan dianggarkan pada APBD dan sebanyak 1307 sub kegiatan atau sebanyak 44,90 persen yang tidak dianggarkan pada APBD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan

dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan memonitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

1. Penyusunan Rancangan Awal (Tekhnokratik) Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024);
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik Dokumen RKPD Tahun 2024;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2024;
4. Verifikasi Usulan kegiatan hasil musrembang kecamatan;
5. Rapat Komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Propinsi Sulawesi-Selatan;
7. Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023);
8. Pendampingan penginputan SIPD Perencanaan pada Perangkat Daerah;
9. Penyusunan Buku Profil Pembangunan; dan,
10. Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2023 di Provinsi;

11. Pelaksanaan e-planning (proses perencanaan dan penganggaran dan pelaporan) melalui aplikasi terpusat yang disediakan kemendagri yakni SIPD; dan,
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala pembangunan berbasis web melalui e-manca.

Selain capaian kinerja tersebut diatas, tahun 2023 Bappelitbangda Kepulauan Selayar telah melaksanakan penyusunan Rancangan Awal (Tekhnokratik) RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045, yang telah sampai pada tahap Konsultasi Publik Dokumen Rancangan Awal RPJPD 2025-2045.

2) Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan 3)

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Perumusan program prioritas tahun 2023 mengacu pada tema fokus dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai tahun 2023, dimana kebijakan nasional pada RKP 2023 diarahkan untuk mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi Pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks Pembangunan manusia, dan (b) tingkat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, penjelasan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD perubahan tahun 2023 halaman 108 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1, Indeks kepuasan masyarakat; 2. Nilai sakiip daerah; 3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Diskominfo SP
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Setda
					Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	
				Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKPSDM
					Persentase ASN yang berkinerja baik	
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Semua Kecamatan
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Bappelitbangda
				Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Daerah
				Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	BPKPD
				Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Disdukcapil
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)						
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satpol PP, Damkar dan				

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Penyelamatan
				Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	DP3AP2KB
				Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Diskominfo SP
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang dan penerapan inovasi daerah	Bappelitbangda
				Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Setwan
				Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	DisPUTR
					Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	
					Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	
				Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	DisPMD
				Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	DisPMD
				Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	DisPMD
				Program penyediaan dan	Cakupan Prasarana Pertanian	Distan KP
	Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan merata serta sesuai sistem penataan dan pemanfaatan ruang	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun			

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				pengembangan prasarana pertanian		
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Semua Kecamatan
				Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	DPK
				Program pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	DLH
				Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
				Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Disdikpora
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Dinkes
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1. Tingkat Kemiskinan; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	DPMPTSPTK
				Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	DPMPTSPTK
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Disperindag KUKM
				Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Distan KP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	unggulan			Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	DPKP
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)	DP3AP2KB
					BKB	
					BKR	
					BKL	
					PIK R	
					UPPKS	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1. Indeks Pendidikan; 2. Indeks Kesehatan	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Disdikpora
					Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
					Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	Dinsos
				Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos
					Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
					panti	
					Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	
					Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	
				Program penanganan bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
				Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	Persentase luas kawasanpermukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	DisPUTR
					Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	
					pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	
					Persentase Luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air	DisPUTR

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				penyediaan air minum	minum sehari-hari	
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	DisPUTR
				Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DPKP
					Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	DPKP
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
					Waktu Tanggap (Response Time)Penangan Kebakaran	
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	Distan KP
				Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	DP3AP2KB
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Dinkes
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
				kehatan masyarakat	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
					kesehatan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	
		Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang Disetarakan	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase jenis komoditi yang dipantau Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Disperindag KUKM Disperindag KUKM
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya unggulan	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Program promosi penanaman modal Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan budidaya Program perekonomian dan pembangunan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah Investor PMDN/PMA Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi Produk Olahan Hasil Perikanan	DPMPSTPTK Disper Disper Setda Disper
		Meningkatnya usahapariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Program pemasaran pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per	Disparbud Disparbud

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
			PAD Kabupaten		kebangsaan	
					Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	
					Tingkat hunian akomodasi	
				Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Dishub
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Disparbud
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Disperindag KUKM
				Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Disperindag KUKM
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Disperindag KUKM
		Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	DPMPTSPTK
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	DPMPTSPTK
				Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Dishub
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	Dishub
	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan	Indeks Ketahanan Sosial	Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Disparbud
				Program penyelenggaraan urusan	Persentase Konflik Sosial	Semua Kecamatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	OPD penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
	berkarakter dan berdaya saing	lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial		pemerintahan umum	danKeagamaan di tingkat kecamatan	
		Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Semua Kecamatan
	Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1. Indeks Kualitas Air; 2. Indeks Kualitas Udara; 3. ndeks Kualitas Tutupan Lahan	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Kesbangpol
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	DLH
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLH
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	DLH
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	DisPUTR

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Tabel 3.6 diatas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja 72 (tujuh puluh dua) program prioritas perangkat daerah dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran prioritas pembangunan daerah, sedangkan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	8 Program	
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa	9 Program	
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	19 Program	
6	6. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			
7	7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
J U M L A H			72 Program	

Pernyataan pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 diatas dapat dilihat pada laporan hasil evaluasi Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 oleh Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan, juga pada Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 halaman 109.

Harmonisasi dan Sinkronisasi pencapaian tersebut di atas dicapai melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing bidang perencanaan Pembangunan diantaranya :

- a. Bidang Pemerintahan yakni : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE serta pemantuan capaian pelaksanaan SDGs;
- b. Bidang Pembangunan manusia diantaranya fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting (rembuk stunting, manajemen data stunting, reviu program kegiatan penurunan angka stunting), pengembangan regulasi anak putus sekolah (pengembangan rencana aksi daerah dab memastikan anggaran berbasis sektor), kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak (KLA), serta teviu terhadap capaian indikator kabupaten sehat;
- c. Bidang perekonomian diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau propinsi Sulawesi Selatan;

- d. Bidang Sumber Daya Alam diantaranya fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), RPSDA-WS (rencana pembangunan strategis sumber daya air wilayah Jeneberang) dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan RDTR (Kawasan KIPT Hangkoang dan KEK Pasi Gusung) dan pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

3) Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah hasil penelitian atau kajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta, infrastruktur dan kewilayahan.

Arah kebijakan dan pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Penelitian dan pengembangan Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan, 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terdapat 2 (dua) hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan daerah / naskah akademik pada kegiatan penyusunan rancangan awal RPJPD 2025-2045, rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan perubahan RKPD 2023, yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022; dan
2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dan;

Tahun 2023, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan kelitbangan, 2 (dua) diantaranya akan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik / Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 (RKPD 2025 dan Rancangan Awal RPJMD 2026-2031), adapun kegiatan dan fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun 2023 diantaranya :

1. Survei Kepuasan Masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
2. Survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;

3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
4. Fasilitasi Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
5. Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;
6. Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2023;
7. Evaluasi program bantuan nelayan;
8. Fasilitasi kajian alga bloom;
9. Koordinasi inisiasi pembentukan kebun raya di puncak tanadoang; dan
10. Fasilitasi inovasi (rumpul laut jadi pupuk).

4) Nilai Sakip

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan penilaian Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pengukurannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, Indikator ini diwujudkan dengan meningkatkan kapabilitas kelembagaan perencana, koordinasi dan kompetensi sdm perencana.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Nilai Sakip** belum dapat disampaikan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2023, disebabkan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2023 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun target yang ingin

dicapai oleh Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2023 mendapat nilai B (60).

Meskipun demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil laporan penilaian SAKIP Bappelitbangda Tahun 2022 Nomor: 018/REV-LAKIP/II/2023/ITDA tanggal 20 Februari 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 60.84 dengan kategori B (Baik). Dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

5) Persentase Nilai Temuan Keuangan

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai temuan material pada laporan pemeriksaan regular oleh Inspektorat Kabupaten, Indikator ini diwujudkan dengan menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Persentase Temuan Keuangan** belum dapat disampaikan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2023, dikarenakan pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2023 pada review Inspektorat sebesar 0%.

Meskipun demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan surat tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 700/068/PKPT/VII/2022/ITDA/ tanggal 20 Juli 2022 dan laporan pemeriksaan regular pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, bahwasanya untuk tahun 2021, Bappelitbangda Kepulauan Selayar **telah menindaklanjuti hasil temuan** yang tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp.73.282.000.- (tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung dengan kegiatan yakni : 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 2) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel. 2.6 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Perencanaan								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.044.083.000	985.679.555	58.403.445	94,41	2	100%	6	100%
2	Urusan Penelitian dan Pengembangan								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	665.226.000	661.481.871	3.744.129	99,44	1	100%	3	100%
3	Urusan Penunjang								
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.092.114.083	4.034.069.855	58.044.228	99,58	2	100%	8	100%

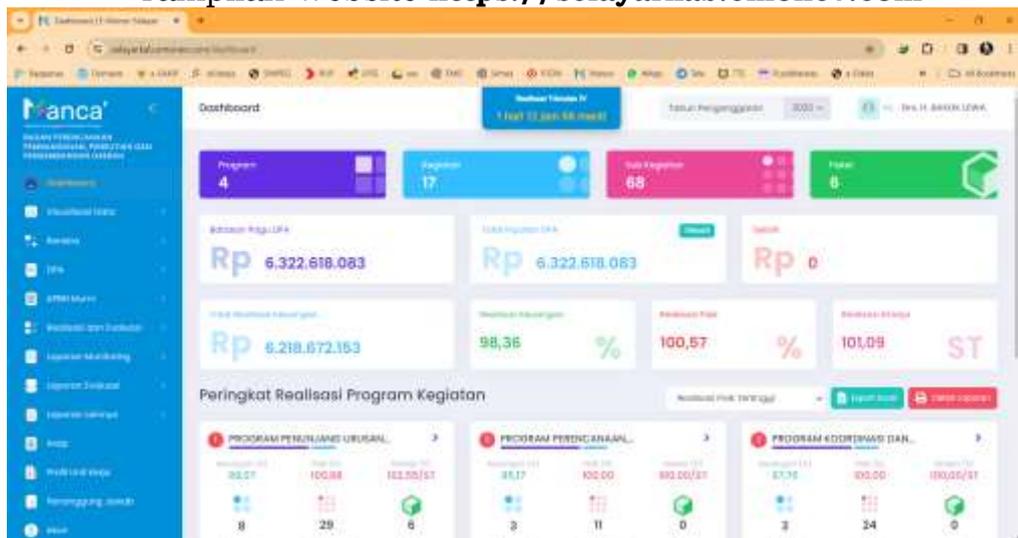
Sumber : RFK Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2023

2.1.5. Inovasi

Perkembangan sistem informasi dan teknologi menuntut Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, mudah di akses dan berbiaya murah, untuk itu pada tahun 2023 Bappelitbangda Kepulauan Selayar membuat inovasi sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu, yang berisi database program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi kinerja dan keuangan per tahun anggaran perencanaan, data tersebut direkap dalam bentuk website sehingga dapat dengan mudah di akses oleh para pengambil kebijakan.

Tujuannya adalah menyediakan data capaian realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran yang dapat akses secara internal di lingkungan OPD terkait.

Gambar 2.1
Tampilan Website <https://selayarkab.emonev.com>



Manfaat integrasi dari aplikasi monitoring dan evaluasi antara lain : 1) organisasi dapat meningkatkan efektivitas, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pencapaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan,

2) Memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis, 3) Memberikan informasi dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran.

2.1.6. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2023, Bappelitbangda Kepulauan Selayar menerima Penghargaan PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan kategori kabupaten berkomitmen tinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender, anak dan disabilitas, penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Saiful Arif dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam acara Pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, pada tanggal 17 April 2023 bertempat di Phinis II Claro Hotel Makassar.

2.2. KEBIJAKAN DAERAH

Sesuai dengan kewenangannya, Bappelitbangda telah menyusun 2 (dua) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan yakni :

Tabel 2.7
Kebijakan Daerah yang ditetapkan tahun 2023

N O	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah yang diselesaikan	Ket
		Nomor, Tanggal Pengesahan	Tentang		
	Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024	Nomor 14 Tahun 2023, Tanggal 7 Juli 2023	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan	Perbup
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Nomor 15 Tahun 2023,	Perubahan Rencana Kerja	menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan	Perbup

N O	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah yang diselesaikan	Ket
		Nomor, Tanggal Pengesahan	Tentang		
	Tahun 2023	Tanggal 24 Juli 2023	Pemerintah Daerah Tahun 2023	Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar	

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2023

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	NIHIL		

BAB III
CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
	NIHIL				

3.2. Hambatan – Hambatan

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2023 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

BAB IV

P E N U T U P

Sistematika penulisannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan adanya Hasil Evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan dicermati, diperhatikan, dikoordinasikan dan ditindaklanjuti guna terwujudnya peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2021 – 2026 dapat tercapai.

Menyadari sepenuhnya, Laporan ini tak luput dari kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, urusan penunjang pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023. Segenap keberhasilan, prestasi maupun keterlambatan dan ketidak-sempurnaan dalam pengelolaan selama tahun 2023 telah disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, semoga Allah SWT akan selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dan semoga selalu meridhoi setiap usaha dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.